



POLICY BRIEF

PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA Vol. 7 No. 1 Tahun 2025

Membangun Sinergi Desa-Kota: Strategi
Kebijakan untuk Pengembangan
Agribisnis Berkelanjutan

Penulis

Agit Kriswantryono,¹ Didik Suhardjito,^{1,2} Sumardjo,³ Sugeng Heri Suseno,⁴ Dahri Tanjung,^{1,5}
Tjondro,¹ Yulia Puspadewi Wulandari,¹ Ulfah Mubarokah¹

¹ Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE), IPB University

² Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University

³ Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University

⁴ Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University

⁵ Program Studi Manajemen Agribisnis, Sekolah Vokasi, IPB University

Membangun Sinergi Desa-Kota: Strategi Kebijakan untuk Pengembangan Agribisnis Berkelanjutan

Isu Kunci

1. Disparitas desa-kota dipengaruhi oleh tantangan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), inovasi, dan teknologi yang tersedia di desa.
2. Hubungan desa-kota memiliki keterkaitan dengan pengembangan agribisnis di pedesaan
3. Diperlukan model pengembangan sinergitas desa-kota dan strategi kebijakan untuk pengembangan agribisnis berkelanjutan.

Ringkasan

Pengembangan agribisnis komoditi utama di wilayah pedesaan perlu difasilitasi dengan kebijakan yang kondusif yaitu, misalnya infrastruktur pendukung pemasaran seperti jaringan mobile. Secara *on farm*, para pelaku telah memiliki kapabilitas dalam menghasilkan produk komoditi, namun sering menghadapi kendala terkait dengan pemasaran. Oleh karena itu intervensi yang mengangkat *bargaining position* nya akan sangat membantu. Upaya meningkatkan keterkaitan desa-kota harus juga memiliki keterkaitan dengan peningkatan kesejahteraan para pelaku di desa. Berdasarkan penelitian ini *action* yang diarahkan pada peningkatan keterkaitan desa-kota selain meningkatkan keterkaitan desa-kota tersebut, juga meningkatkan pendapatan para pelaku di desa.

Kata kunci: kebijakan, agribisnis, desa, kota

Pendahuluan

Upaya mengurangi kesenjangan wilayah desa kota diharapkan dapat mengikis jurang kemiskinan yang terjadi di pedesaan, menumbuhkan kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu dalam pembangunan kewilayahan, pembangunan perdesaan menjadi salah satu fokus pemerintah sebagaimana dimaktubkan dalam RPJMN. Beberapa tantangan dalam pembangunan perdesaan (Diah, 2020) diantaranya adalah: (1) belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi pedesaan yang berorientasi pada keunggulan geografis dan sumber daya lokal sebagai basis ekonomi dalam pembangunan pedesaan, dan (2) masih kurang aktifnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan pedesaan. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi desa tersebut dibutuhkan strategi pembangunan pedesaan yang mengintegrasikan keterkaitan desa dan kota agar dapat terwujud desa yang mandiri (Suherman, 2017).

Pada saat ini, *rural-urban linkage development approach* (pendekatan pembangunan dengan keterkaitan hubungan *rural-urban*) mulai banyak dijalankan di negara-negara berkembang sebagai instrumen pembangunan wilayah untuk menurunkan tingkat kesenjangan pembangunan desa-kota. Pembangunan desa akan selalu terkait dengan proses perubahan yang terjadi di tingkat nasional. Setiap perubahan yang terjadi akan berdampak langsung pada seluruh kehidupan masyarakat pedesaan. Sehingga pembangunan desa dapat tercapai apabila kegiatan pembangunan di wilayah pedesaan selalu dikaitkan dengan pembangunan kota karena keterkaitan desa dengan kota adalah suatu hal

yang tidak dapat dihindari. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan arus balik dana atau kapital yang selama ini mengalir dari desa ke kota menjadi dari kota ke desa. Demikian pula arus balik produk atau jasa dari kota ke desa menjadi dari desa ke kota. menjelaskan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi investasi harus ditempatkan di wilayah yang memiliki potensi cepat tumbuh, yaitu wilayah perkotaan. Dengan cara ini wilayah perkotaan akan berkembang dengan cepat dan selanjutnya akan merangsang pertumbuhan wilayah pedesaan melalui efek menyebar (*spread effect*) atau efek tetesan ke bawah (*trickle-down effect*).

Permasalahan yang dihadapi dalam konteks pembangunan desa-kota saat ini adalah masih tingginya ketimpangan yang terjadi antara pembangunan di perkotaan dan perdesaan. Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) mencatat terdapat 14,64 juta penduduk miskin di **pedesaan** atau 12,53 persen pada September 2021, lebih tinggi daripada jumlah penduduk miskin di **kota** yang sebanyak 11,86 juta atau 7,6 persen. Ketimpangan antara desa dengan kota penting untuk segera diatasi, karena hal itu menjadi penyebab terus meningkatnya urbanisasi dari tahun ke tahun.

Sementara itu berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024, masih terdapat 7,99% atau 5.943 desa berstatus tertinggal dan 4,94% atau 3.676 desa berstatus sangat tertinggal (KDPDTT, 2024). Hal ini semakin menguatkan perlunya upaya lebih untuk mendorong kemajuan di desa.

Telah banyak upaya pemerintah mengatasi disparitas desa kota diantaranya dilakukan melalui alokasi dana desa, peningkatan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah 3T (tertinggal, terdepan,

terluar), mendorong pertumbuhan ekonomi di perdesaan, dan masih banyak lagi. Namun upaya tersebut menghadapi sejumlah tantangan seperti kesiapan SDM atau inovasi dan teknologi yang dimiliki desa. Kolaborasi quintuple helix (Pemerintah desa, tokoh pembaharu, kelembagaan antara petani, perguruan tinggi, dan industri) atau multipihak menjadi salah satu kunci penggerak ekonomi desa (Tanjung et al, 2024)

Upaya penguatan kesenjangan desa kota dipengaruhi beberapa faktor. Kegiatan ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan mengatasi kesenjangan Desa-Kota antara lain tidak terbatas pada beberapa aspek berikut:

- a. Kendala aliran barang dari desa ke kota
- b. Kelancaran arus aliran uang, investasi, teknologi, informasi dan sebagainya dari kota ke desa
- c. Ketersediaan lapangan pekerjaan di pedesaan sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja
- d. Kompleksitas arus urbanisasi
- e. Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Interaksi desa kota memiliki karakteristik berbeda pada wilayah yang berbeda. OECD (2013) mengidentifikasi 3 kategori wilayah yang menyoroti perbedaan bobot dimensi perkotaan dan pedesaan dalam struktur wilayah, yaitu: 1) wilayah metropolitan; 2) jaringan kota kecil dan menengah; 3) daerah berpenduduk jarang. Oleh karena itu kebijakan terkait hubungan desa kota perlu mempertimbangkan tipologi wilayah. Perpaduan kegiatan perdesaan dan perkotaan dapat membentuk suatu koneksi yang unik dan menguntungkan, sehingga diperlukan suatu intervensi yang lebih intensif (Pradoto et.al, 2018).

Tipologi Desa-Kota

Telaah terhadap keterkaitan desa-kota dapat dilakukan melalui pendekatan komoditi unggulan desa dimana hubungan desa kota dilihat dari keragaan agribisnis di pedesaan, dan bagaimana keterkaitannya dengan perkotaan melalui aspek tataniaga dan investasi pengusahaan komoditi di desa. Dari hasil penelitian diperoleh keragaan sebagai berikut:

1. Agribisnis komoditi unggulan desa

Antara desa-kota terdapat beberapa tipe keterkaitan diantaranya keterkaitan fisik, ekonomi, pergerakan, penduduk, teknologi, interaksi sosial, pelayanan, politik, administrasi dan organisasi (Dewi, 2023). Pada kajian ini salah satu pendekatan dalam kajian hubungan desa kota adalah melalui kegiatan agribisnis komoditi unggulan.

Adanya keterkaitan antara kota dengan desa (*urban-rural linkages*) dalam konsep agribisnis dapat bersifat interdependensi/timbal balik dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian di perdesaan mengembangkan usaha budi daya (*on farm*) dan produk olahan skala rumah tangga (*off farm*), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budi daya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian antara lain: modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian dan pasar (Ruchyat, 2003). Pendekatan keterkaitan desa kota diharapkan dapat menaikkan nilai tukar produk atau jasa masyarakat perdesaan melalui pemindahan proses produksi dari kota ke desa, memperpendek jalur produksi, pemasaran dan distribusi maupun dengan memberikan akses yang lebih besar terhadap faktor-faktor produksi kepada Masyarakat desa (Maryadi, 2015).

Aktivitas Hulu (Off Farm)	Aktivitas Budidaya (On farm)	Aktivitas Hilir (Off Farm)
<p>1. Modal Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pribadi, pinjaman keluarga, KUR BRI, KUBE ✓ Bantuan pemerintah ✓ Kemitraan ✓ BUMDes, <p>2. Kelembagaan Keuangan: koperasi, BUMDes dan bank pemerintah</p> <p>3. Sarana produksi: agen benih, pelaku/peternak Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah terdapat kelembagaan usaha tani di setiap desa/kelurahan • Status kepemilikan lahan: milik sendiri, sewa lahan ke keluarga, lahan pemerintah desa, lahan garap • Rata-rata tenaga Kerja di usaha pertanian merupakan anggota keluarga sendiri, penggunaan jasa buruh tani umumnya saat panen raya dan persiapan lahan • Sistem kontrak kerjasama dengan perusahaan eksportir, kontrak dengan mitra lembaga, lelang online, dll 	<ul style="list-style-type: none"> • Produk yang dijual di setiap desa terbagi dalam bentuk primer dan olahan • Pemasaran: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemasaran utama lewat pengepul regional ❖ Komoditi bermitra dengan lembaga, restoran, rumah sakit, sekolah ❖ Komoditi bermitra dengan eksportir luar negeri ❖ Komoditi dengan tengkulak lingkup antar provinsi (pasar lelang online) ❖ Komoditi sapi potong: pembeli datang sendiri ke kelompok tani

Gambar 1 Sistem agribisnis komoditi unggulan pedesaan

Secara umum keragaan komoditi unggulan pedesaan menunjukkan bahwa secara umum dari aktivitas hulu, *on farm* dan hilir, telah berkembang dengan baik dan didukung oleh layanan agribisnis yang memadai di pedesaan. Kebutuhan masyarakat akan sarana produksi berbagai komoditi telah tersedia di pedesaan, baik itu kebutuhan modal usaha maupun sarana produksi.

Pada sub sistem hilir agribisnis, pemasaran beberapa komoditi unggulan pedesaan telah menggunakan sosial media. Penggunaan teknologi internet sebagai salah satu solusi pemasaran ini telah menghapus kendala dalam sistem pemasaran yang lebih

Hubungan desa dan kota di wilayah studi lebih terlihat pada lini hilir dimana desa-desa studi menjadi pemasok utama

MODEL INVESTASI KOTA-DESA

1 INVESTASI BERBASIS ANGARAN PEMERINTAH	2 INVESTASI BERBASIS JAMINAN PASAR	3 INVESTASI BERBASIS JAMINAN PRODUK	4 INVESTASI BERBASIS KEMITRAAN INDUSTRI
<p>Peran Pemerintah dalam mendorong pengembangan komoditi unggulan melalui bantuan sarana produksi, sarana prasarana, pendampingan, dll</p> 	<p>Kerjasama petani dengan pihak (pedagang/industri) yg menjamin pembelian barang dr petani</p> 	<p>Pembeli dari kota berinvestasi untuk mendapatkan produk dr petani didesa</p> 	<p>Industri bermitra dengan petani dalam penyediaan sarana produksi atau penyerapan hasil</p> 

Gambar 2 Model Investasi Desa-Kota

produk-produk pangan ke wilayah kota sekitar. Pada lini hulu hubungan dalam penyediaan permodalan usaha dan sarana produksi terbilang kecil dapat dilihat dari arus investasi dari kota ke desa yang masih minim (Tanjung, et.al, 2023).

2. Aspek tataniaga

Aspek tataniaga selain melihat efisiensi jaringan tataniaga masing-masing komoditi, juga melihat *margin* antar pelaku tataniaga di masing-masing komoditi. Dari penelitian 1 hingga ke 3, terlihat bahwa angka *farmer share* untuk semua komoditi unggulan di masing-masing wilayah, terlihat share harga yang diterima oleh petani, masih sangat bagus. Tertinggi yaitu di Jawa Tengah – DIY (penelitian tahun 2), dimana komoditi yang menjadi fokus pengamatan yaitu: sapi potong (ternak), bandeng (ikan), salak (buah) dan cabe merah (sayuran).

Penelitian pada tahun 1 dan 3 memiliki keragaan *farmer share* yang hampir sama dimana rataan *farmer share* nya yaitu 47,29 % pada tahun 1 dan 46,41% pada tahun ke 3, dan kisarannya 30,0 % - 62,5 % pada tahun 1 dan 36,85% - 59,52 % di tahun 3.

Tabel 1. Keragaan tataniaga berbagai komoditi di wilayah penelitian

URAIAN	DKI-Jawa Barat	Jawa Tengah-DIY	Kupang-NTT
<i>Farmer share</i> (rataan)	47,29%	61,2%	46,41%
Kisaran <i>farmer share</i>	30%-62,50%	30% – 100 %	36,84% - 59,52%

Sumber: Data primer (diolah)

3. Investasi agribisnis

Terdapat empat model investasi desa-kota (Suhardjito et al, 2024) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2. **Investasi berbasis anggaran pemerintah** umum terjadi di pedesaan. Peran anggaran pemerintah masih dominan terutama pada pembangunan infrastruktur fisik. **Investasi berbasis jaminan pasar** terjadi pada pemasaran komoditi pedesaan. Investasi ini dilakukan oleh pelaku di pedesaan baik para petani maupun pedagang pengumpul.

Model investasi ketiga, yaitu **investasi berbasis jaminan produk** terjadi dimana pelaku tataniaga di kota yang membutuhkan komoditi pedesaan, memberikan uang jaminan kepada petani, nelayan atau peternak, atau juga pedagang pengumpul di desa untuk mendapatkan komoditi yang mereka butuhkan dan dipasarkan di kota. Model ini banyak terjadi pada komoditi ikan laut, sapi potong, mangga, dll. Model keempat adalah **investasi berbasis kemitraan industri**. Dimana petani biasanya bermitra dengan industri dalam hal budidaya komoditi tertentu (kasus kentang di Garut), dan industri yang menyerap pemasaran komoditi tersebut.

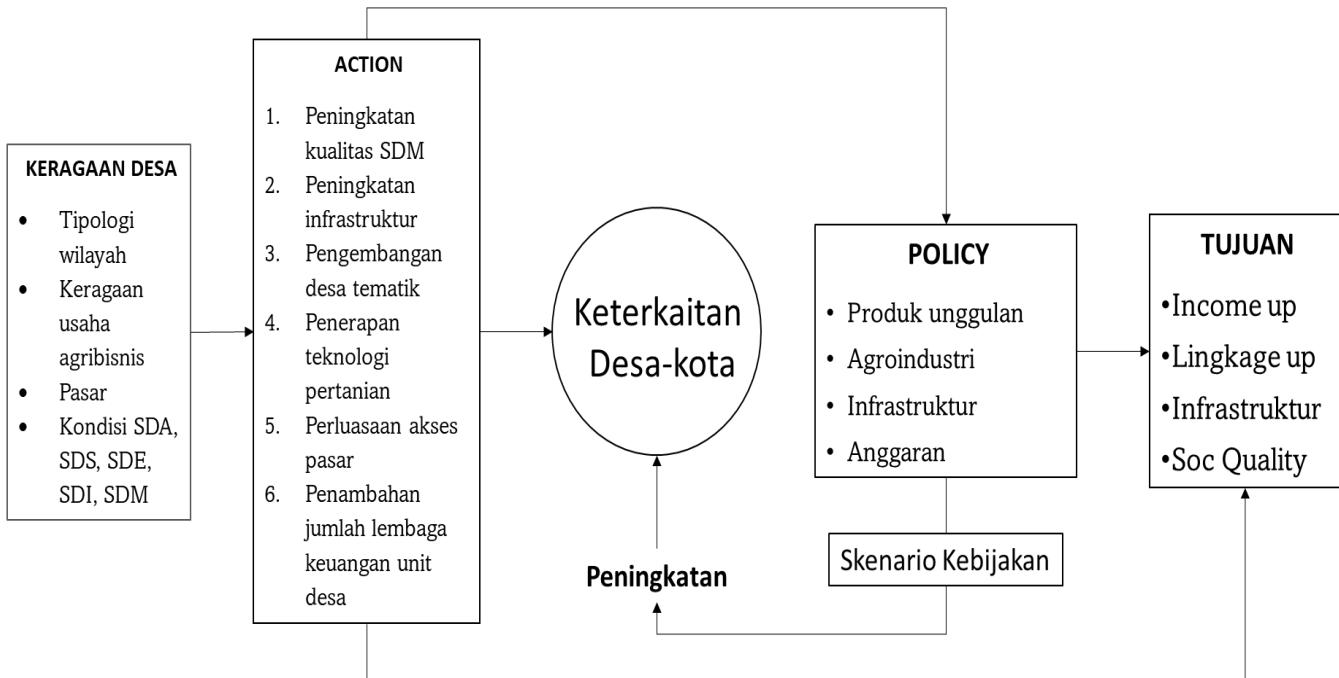
Tantangan Pengembangan Wilayah Desa

Karakteristik tipologi wilayah dataran tinggi (*upland*) dan dataran rendah (*lowland*) perlu dipertimbangkan dalam intervensi kebijakan maupun mendorong investasi ke desa. Hasil studi menunjukkan beberapa karakteristik dan tantangan pengembangan wilayah seperti disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Tipologi Wilayah Upland dan Lowland

Indikator	UPLAND	LOWLAND
SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan pendukung pengembangan komoditi masih relatif tersedia • Tantangan pengembangan pertanian pada dataran tinggi dengan topografi berbukit, serta lahan kering adalah produktivitas pertanian rendah • Adanya ancaman bencana longsor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya ancaman alih fungsi lahan menjadi industri & permukiman • Kegiatan pertanian terkendala ketersediaan air
SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat • Kegiatan pertanian dilakukan secara turun temurun. • Kualitas SDM pertanian masih rendah ditambah keterbatasan aksesibilitas terhadap jaringan informasi dan minim pendampingan di bidang pertanian • Urbanisasi dan migrasi keluar desa cukup tinggi menyebabkan pertanian semakin ditinggalkan oleh generasi muda 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada <i>lowland</i> pedesaan, mata pencaharian utama pertanian • Pada <i>lowland</i> perkotaan, pertanian tidak lagi menjadi mata pencaharian utama. • Urbanisasi dan migrasi tinggi, sehingga kekurangan SDM pertanian. • Kualitas SDM masih rendah namun adanya pendampingan cukup membuka akses informasi bagi petani
SDI	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum kondisi infrastruktur dasar kawasan masih membutuhkan dukungan. • Dukungan infrastruktur pertanian masih perlu ditingkatkan khususnya terkait sarana pengolahan hasil pertanian, teknologi pasca panen dan akses transportasi yang baik untuk mempertahankan kualitas hasil pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas dan keterjangkauan lebih mudah dan luas untuk wilayah <i>lowland</i> kaitannya dalam pengembangan usaha tani. • Kondisi infrastruktur pada kawasan <i>lowland</i> pedesaan (termasuk daerah 3T) masih perlu ditingkatkan • Dukungan infrastruktur pertanian masih perlu ditingkatkan terkait sarana penyediaan air untuk aktivitas budidaya.
SDE	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas terhadap lembaga keuangan terbatas. • Pemasaran produk pertanian umumnya masih tingkat lokal atau hingga pasar Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas terhadap lembaga keuangan lebih terjangkau dengan keberadaan lembaga keuangan seperti bank dan koperasi. • Pemasaran produk pertanian sudah lintas kabupaten bahkan antar pulau karena kemudahan akses transportasi.
SDS	<ul style="list-style-type: none"> • Masih didominasi masyarakat asli, karakteristik gotong royong dan nilai-nilai sosial masih cukup tinggi • Masih menjunjung tinggi adat dalam setiap kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah mulai banyak pendatang, terjadi akulturasi budaya, nilai-nilai seperti gotong royong mulai berkurang

Keterangan: SDA: Sumberdaya Alam; SDM: Sumberdaya Manusia, SDI: Sumberdaya Infrastruktur; SDE: Sumberdaya Ekonomi; SDS: Sumberdaya Sosial



Gambar 3 Model Kebijakan Integrasi Desa-Kota

Sinergi Desa-Kota

Berdasarkan skenario yang telah diuraikan diatas, maka model pengembangan desa-kota sebagaimana disajikan pada Gambar 2 di bawah ini. Model ini menjelaskan bahwa keterkaitan desa-kota dipengaruhi oleh beragam faktor. Faktor yang pertama adalah begaimana kondisi wilayah desa itu sendiri, diantaranya tipologi wilayahnya, kondisi pengusahaan komoditi utama, bagaimana pasar, daya dukung SDA, SDS, SDE, SDI dan SDM di pedesaan. Berdasarkan keragaan desa ini action apa yang dibutuhkan dan tepat untuk mendorong tercapainya keterkaitan desa dan kota melalui kebijakan yang pemerintah. Hasil permodelan menunjukkan bahwa kebijakan paling berdampak adalah kebijakan pengembangan infrastruktur dan kebijakan anggaran yang penting diimplementasikan oleh pemerintah dalam meningkatkan keterkaitan hubungan desa-kota.

Implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan kebijakan desentralisasi anggaran dampak utamanya adalah meningkatkan keterkaitan hubungan desa-

kota, namun demikian kebijakan tersebut juga berdampak kepada peningkatan pendapatan para pelaku di desa, peningkatan infrastruktur pedesaan serta peningkatan kualitas hubungan sosial masyarakat pedesaan, dengan intensitas dampak bervariasi lebih rendah dibandingkan dengan dampak terhadap keterkaitan hubungan desa-kota.

Sementara dari permodelan, menunjukkan bahwa semua action berdampak langsung (tertinggi) kepada peningkatan keterkaitan hubungan desa-kota, kecuali action perluasan akses pasar, dimana action ini paling berdampak kepada peningkatan pendapatan pelaku. Sementara dampak terhadap peningkatan pendapatan, peningkatan infrastruktur dan kualitas sosial, hasilnya bervariasi.

Rekomendasi

Saran kebijakan dalam penelitian ini akan dituliskan menjadi dua bagian yaitu saran dan kebijakan umum serta saran dan kebijakan

khusus. Saran dan kebijakan umum berdasarkan hasil penelitian ini adalah sbb :

1. Pengembangan agribisnis komoditi utama di wilayah pedesaan perlu difasilitasi dengan kebijakan yang kondusif yaitu, misalnya infrastruktur pendukung pemasaran seperti jaringan *mobile*.
2. Secara *on farm*, para pelaku telah memiliki kapabilitas dalam menghasilkan produk komoditi, namun sering menghadapi kendala terkait dengan pemasaran. Oleh karena itu intervensi yang mengangkat bargaining position nya akan sangat membantu.
3. Upaya meningkatkan keterkaitan desa-kota harus juga memiliki keterkaitan dengan peningkatan kesejahteraan para pelaku di desa. Berdasarkan penelitian ini *action* yang diarahkan pada peningkatan keterkaitan desa-kota khususnya dalam upaya meningkatkan pendapatan para pelaku di desa.

Daftar Pustaka

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024. BPS. Jakarta.
- Dewi EY. 2023. Keterkaitan Desa-Kota dalam Kegiatan Produksi-Distribusi Komoditas Unggulan Pertanian di Kabupaten Wonosobo. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 174 Hal.
- Diah MP. 2020. Pembangunan Pedesaan untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa dan Kota di Indonesia. Jurnal ilmiah Administrasi Publik. 2 (2): 166 (2020).
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi [KDPDT]. 2024. Indeks Desa Membangun Tahun 2024. Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan KDPDT. Jakarta.
- Kriswantriyono A, Dahri T, Suhardjito D, Sumardjo, Sugeng HS, Tjondro, Wulandari YP, Mubarokah U. 2024. Kajian Hubungan Rural Urban untuk Pembangunan Berkelanjutan. CARE IPB. Bogor.
- Maryadi. 2015. Keterkaitan Desa-Kota: Sebuah Alternatif Pembangunan di Wilayah Pedesaan. JSTI, 17 (2): 1-6.
- OECD. 2013. Rural-Urban Partnerships an Integrated Approach to Economic Development. OECD Publishing. 332p. <https://doi.org/10.1787/9789264204812-en>.
- Pradoto W, Setiyono B, & Wahyono H. 2018. Peri-urbanization and the dynamics of urban-rural linkage: the case of Sukoharjo Regency, Central Java. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 202, 1–9.
- Deni, Ruchayat. 2003. Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Yang Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jakarta: Direktorat Jendral Penataan Ruang.
- Suherman A. 2017. Integrasi Pembagunan Desa-Kota Menuju Kemandirian Pangan Dan Masyarakat Sejahtera. Proceeding Seminar Nasional on Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa-Kota. UNAND.
- Tanjung D, Kriswantriyono K, Purnamadewi YL, Suharjito D, Wulandari YP. 2024. Strengthening applied rural innovation in rural-urban linkages. Proceeding BIO Web of Conferences 123: ISOTOBAT 2024. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202412304005>
- Tanjung D, Kriswantriyono K, Wulandari YP, Purnamadewi YL, Suharjito D. 2023. Pengembangan pertanian dalam Mengurangi Ketimpangan Desa-Kota Menuju Penguatan Ekonomi Jawa Barat. Jurnal CARE, 8 (1): 62-76.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Agit Kriswantryono, merupakan Peneliti Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE) Lembaga Riset Internasional IPB. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pusat CARE LRI IPB. Bidang Keahlian Pembangunan pedesaan, lingkungan dan pemberdayaan Masyarakat.. (*Corresponding Author*)

Email: kriswantryono@apps.ipb.ac.id



Didik Suhardjito, merupakan Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Saat ini menjabat Kepala Pusat CARE LRI IPB. Bidang kepakaran Antropologi Ekologi.



Sumardjo, merupakan Guru Besar Dep. Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM), Fakultas Ekologi Manusia IPB. Bidang kepakaran Sosiologi Pedesaan, Penyuluhan Pembangunan, Resolusi Konflik, Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi Pembangunan.



Sugeng Heri Suseno, merupakan Guru Besar Fakultas Perikanan IPB. Saat ini menjabat Kepala Direktorat Riset dan Inovasi IPB. Bidang kepakaran pengelolaan lingkungan dan perikanan.



Dahri Tanjung, merupakan Peneliti Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE) Lembaga Riset Internasional IPB. Saat ini menjabat dosen manajemen agribisnis pada sekolah vokasi IPB. Bidang keahlian sosial ekonomi pertanian.



Tjondro, Tenaga merupakan peneliti CARE LRI IPB. Bidang kepakaran : Sosial, Ekonomi dan lingkungan.



Yulia Puspadi Wulandari, merupakan Peneliti Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE) Lembaga Riset Internasional IPB. Bidang kepakaran pertanian, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.



Ulfah Mubarokah, merupakan Peneliti Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE) Lembaga Riset Internasional IPB. Bidang kepakaran sosial kemasyarakatan.

ISSN 2828-285X



Telepon
+62 813 8875 4005



Email
dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat
Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680